

PENGARUH INVESTASI DAN PENGEMBANGAN SEKTOR-SEKTOR EKONOMI SERTA UMKM TERHADAP KESEMPATAN KERJA DI SUMATERA BARAT

Hendry Muhammad Ali¹ Herry Wira Wibawa², Atik Budi Paryanti³

hendryali.hayati@gmail.com¹, hwwibawa@gmail.com², atikbudiparyanti@gmail.com³

STIE SWADAYA^{1,2}, Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma³

ABSTRACT

The problems studied are government and private investment as well as the development of economic sectors and MSMEs (Micro, Small and Medium Enterprises) and their effect on job opportunities in West Sumatra. The basic social problems faced in Indonesia are high levels of unemployment and poverty in the midst of government policies that have not met expectations. This study aims to analyze the effectiveness and ability to realize the targets of government policies in government and private investment, development of economic sectors, and MSMEs in order to increase job opportunities in West Sumatra Province. The factors studied are government investment, private investment, GRDP of the primary, secondary, tertiary, and MSME sectors.

This study uses an explanatory method with a hypothesis testing study approach which explains the causal relationship in employment opportunities in West Sumatra through hypothesis testing. The data is compiled in time-series for the years 2000-2014 in a semi-annual period. The research model is formulated as a linear function based on Nerlove's Partial Adjustment Model approach and analyzed recursively using linear regression using the Ordinary Least Square (OLS) method.

The research findings are: Government policies in public and private investment as well as the development of economic sectors and MSMEs are jointly effective in encouraging increased employment opportunities in West Sumatra. Individually, Employment Opportunities are more determined by government policies in government investment and the development of the primary and tertiary sectors. However, the government's ability to realize the target of job opportunities is still relatively low.

Keywords: investment, economic sector development, MSMEs, job opportunities.

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Sumatera Barat merupakan daerah dengan 19 kabupaten/kota terdiri dari 12 kabupaten dan 7 kota yang terdiri dari 176 kecamatan, dengan kepulauan Mentawai yang memiliki wilayah terluas yaitu 6,01 ribu km² atau 14,21 % dari luas Provinsi Sumatera Barat. Berdasarkan data tahun 2009, jumlah penduduk Sumatera Barat mencapai 4.83 juta jiwa. Jumlah laki-lakinya 2,37 juta jiwa, sedangkan penduduk perempuan sebanyak 2,46 juta

orang. Jumlah angkatan kerja Sumatera Barat tahun 2009 mencapai 64,19 % dari seluruh penduduk, umur 15 tahun di atas dimana 1,99 juta jiwa diantaranya bekerja. Sektor pertanian masih merupakan sektor yang paling menyerap tenaga kerja, yakni sebesar 45,39 % dari keseluruhan jumlah penduduk yang bekerja. Disusul kemudian sektor-sektor lain seperti perdagangan, baik dalam skala besar maupun pengecer; usaha kuliner/ rumah makan; dan perhotelan, yakni mencapai 20,76 %. Sedangkan sektor jasa kemasyarakatan sebanyak 14,34 %.

Berdasarkan data, pertumbuhan ekonomi di provinsi Sumatera Barat berlangsung relatif bagus, meskipun sempat mengalami penurunan pada tahun 2009. Dari tahun 2005 – 2008 pertumbuhannya berada di atas rata-rata, yakni sebesar 5,6%. Ini merupakan prestasi yang luar biasa, jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Sebagai dampak dari krisis moneter yang terjadi pada tahun 1998, pertumbuhan ekonomi di Sumatera

Barat pada tahun 2002-2004 berada di bawah rata-rata. Apa yang terjadi pada tahun 2009 itu juga merupakan efek dari krisis keuangan, yaitu yang berlangsung pada tahun 2008.

Dalam hal investasi, dari tahun 2001-2010, kontribusi Provinsi Sumatera Barat memang cenderung menurun. Hanya pada tahun 2009 mengalami peningkatan. Kontribusi Provinsi Sumatera Barat dalam hal investasi tertinggi terjadi pada tahun 2001, yakni mencapai 20%. Dari capaian tersebut menunjukkan bahwa di tahun itu perekonomian Sumatera Barat sedang mengalami pemulihan, pasca krisis. Sementara, kontribusi investasi terendah terjadi pada tahun 2017, yakni 17,1%. Rendahnya angka tersebut disebabkan karena kepercayaan investor yang juga rendah terhadap Provinsi Sumatera Barat. Mereka merasa tidak yakin untuk menanamkan modalnya. Hal itu tak terlepas dari banyak hal yang belum kondusif diantaranya: birokrasi perizinan dan praktik pungutan liar yang masih terbilang tinggi. Jika melihat dari angka-angka yang ada, selama sepuluh tahun yang dimulai dari 2001 hingga 2010, pada lima tahun pertama, yaitu 2001-2005, kontribusi investasi Provinsi Sumatera Barat menunjukkan angka di atas rata-rata, yakni 18,1%. Barulah pada lima tahun kedua, yaitu 2006-2010 mengalami penurunan, menjadi di bawah rata-rata.

Secara umum, pengeluaran pemerintah di saat itu, yaitu dari tahun 2001 hingga 2010 terus meningkat. Peningkatan tersebut diperkirakan karena penerimaan pemerintah dari sektor pajak yang juga mengalami peningkatan. Selain itu, kemungkinan juga karena upaya pemerintah yang berusaha makin mendorong pengeluarannya pada bidang-bidang strategis, yang diperkirakan akan bisa merangsang peningkatan pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat. Pada tahun 2001, kontribusi pengeluaran pemerintah mencapai 13,4%. Ini merupakan kontribusi tertinggi. Sedangkan kontribusi pengeluaran terendah terjadi pada tahun 2008, yaitu sebesar 11,5%. Itu terjadi karena menurunnya aktivitas pemerintah semisal proyek-proyek serta program pembangunan. Pada tahun 2001-2004 dan tahun 2010 rata-rata kontribusi pengeluaran pemerintah Sumatera Barat di atas rata-rata, yakni 12,1%. Itu terjadi karena pada tahun-tahun itu kontribusi pengeluaran pemerintah untuk pos-pos yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi relatif tinggi.

Pembangunan ekonomi tidak bisa lepas dari kesempatan kerja yang juga dipengaruhi oleh banyak faktor, namun pada penelitian ini dibatasi oleh faktor investasi pemerintah, investasi swasta, perkembangan sektor-sektor ekonomi dan UMKM. Peran dari pemerintah daerah dengan segala daya upayanya memberdayakan secara maksimal sumberdaya yang ada di wilayah masing-masing sangatlah besar perannya bagi proses pembangunan nasional. Pemerintah daerah juga dituntut kemandiriannya, dalam hal ini terkait dengan pembiayaan terhadap biaya operasional rumah tangga daerahnya sendiri.

Rumusan Masalah

Rumusan masalah dan akan diperoleh jawabannya melalui penelitian ini adalah:

1. Bagaimanakah pengaruh investasi pemerintah; investasi swasta; PDRB sektor primer, sekunder, dan tersier; serta UMKM secara simultan terhadap peluang kerja di Provinsi Sumatera Barat?
2. Bagaimanakah pengaruh dari investasi pemerintah secara parsial terhadap peluang kerja di Provinsi Sumatera Barat?
3. Bagaimanakah pengaruh dari investasi swasta secara parsial terhadap peluang kerja di Provinsi Sumatera Barat?
4. Bagaimanakah pengaruh PDRB dari sektor primer secara parsial terhadap peluang kerja di Provinsi Sumatera Barat?
5. Bagaimanakah pengaruh PDRB dari sektor sekunder secara parsial terhadap peluang kerja di Provinsi Sumatera Barat?
6. Bagaimanakah pengaruh PDRB dari sektor tersier secara parsial terhadap peluang kerja di Provinsi Sumatera Barat?
7. Bagaimanakah pengaruh UMKM secara parsial terhadap kesempatan kerja di Provinsi Sumatera Barat?

Tujuan Penelitian

Secara umum tujuan penelitian untuk menganalisis efektivitas dan kemampuan merealisasikan sasaran dari kebijakan pemerintah dalam investasi pemerintah dan swasta serta pengembangan sektor-sektor ekonomi dan UMKM untuk meningkatkan kesempatan kerja di Sumatera Barat.

Adapun tujuan khusus melalui penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah adalah:

- 1) Mengkaji pengaruh investasi pemerintah, investasi swasta, PDRB sektor primer, sekunder, dan tersier, UMKM secara simultan terhadap

peluang kerja di Provinsi Sumatera Barat.

- 2) Mengkaji pengaruh investasi pemerintah secara parsial terhadap peluang kerja di Provinsi Sumatera Barat.
- 3) Mengkaji pengaruh investasi dari swasta secara parsial terhadap peluang kerja di Provinsi Sumatera Barat.
- 4) Mengkaji pengaruh PDRB dari sektor primer secara parsial terhadap peluang kerja di Provinsi Sumatera Barat.
- 5) Mengkaji pengaruh dari PDRB sektor sekunder secara parsial terhadap peluang kerja di Provinsi Sumatera Barat.
- 6) Mengkaji pengaruh PDRB dari sektor tersier secara parsial terhadap peluang kerja di Provinsi Sumatera Barat.
- 7) Mengkaji pengaruh UMKM secara parsial terhadap peluang kerja di Provinsi Sumatera Barat.

TINJAUAN PUSTAKA

Penelitian Terdahulu

Fungsi penting dari investasi dalam pembangunan adalah meningkatkan kapasitas produksi yang secara otomatis akan berimbas pada kenaikan output serta jalannya pertumbuhan ekonomi. Apabila tingkat output di suatu wilayah relatif tinggi, maka masalah kemiskinan bisa dipatahkan dan pembangunan ekonomi meningkat secara otomatis (Jinghan, 2000). Sedangkan Deliarnov (1995) berpendapat, investasi merupakan salah satu komponen dari pengeluaran agregat. Semakin banyak investasi yang dilakukan membuat semakin besar pengeluaran agregatnya. Dengan demikian, semakin tinggi juga pendapatan nasional dari suatu negara tersebut.

Makmun dan Yasin (2003) mengemukakan, investasi merupakan kunci penentu dari laju pertumbuhan ekonomi. Sebab disamping investasi akan mendorong peningkatan secara signifikan output suatu daerah, ia juga akan

membuat permintaan akan input naik secara otomatis. Dengan demikian peluang kerja pun akan meluas, sehingga kesejahteraan masyarakat pun akan tercapai. Menurut Todaro (2000), pembangunan ekonomi ada 3 (tiga) yaitu:

- (1) Akumulasi modal.
Mencakup di dalamnya, akumulasi modal baru dalam wujud SDM, tanah, dan peralatan fisik.
- (2) Perkembangan penduduk.
Penduduk yang berkembang akan dengan sendirinya diikuti oleh pertumbuhan tenaga kerja beserta keahliannya.
- (3) Kemajuan teknologi.
Akumulasi modal akan sangat mungkin untuk berhasil, jika sebagian pendapatan yang diperoleh ditabung atau diinvestasikan untuk memperbesar produk (*output*) yang akan memperbesar pendapatan juga di masa mendatang.

Selain investasi swasta, peranan investasi pemerintah juga dapat dilihat dari belanja daerah. Belanja daerah terdiri dari dua jenis, yaitu belanja langsung dan belanja tidak langsung. Belanja Langsung adalah belanja yang sudah dianggarkan sebelumnya dan digunakan untuk keperluan pelaksanaan kegiatan yang sudah diprogramkan. Sebaliknya, belanja tidak langsung ialah belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program kegiatan.

Adapun yang termasuk ke dalam belanja langsung meliputi: belanja barang dan jasa, belanja modal, dan belanja pegawai. Sedangkan belanja tidak langsung meliputi: subsidi, bantuan sosial, bunga, hibah, bantuan keuangan, belanja bagi hasil, dan belanja tak terduga.

Pertumbuhan ekonomi yang baik, perkembangan sektor-sektor produksi, baik sektor primer, sektor sekunder, maupun sektor tersier juga memegang peranan

penting. Peningkatan nilai tambah bruto dari sektor-sektor produksi akan mendorong meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan pendapatan masyarakat.

Pertumbuhan ekonomi adalah hal yang menunjukkan maju tidaknya, berhasil tidaknya pembangunan suatu daerah.

Sedangkan tolok ukur dari pertumbuhan ekonomi suatu negara ialah pendapatan nasionalnya. Menurut Todaro (2000) pendapatan nasional ialah nilai dari barang serta jasa yang diproduksi/ dihasilkan oleh sebuah negara dalam periode waktu tertentu. Adapun tujuan dari penghitungan pendapatan nasional ialah agar memiliki gambaran perihal kondisi/ tingkat perekonomian suatu negara. Cara menghitung pendapatan nasional yaitu dengan menghitung PDB/ Pendapatan Domestik Bruto. Definisi PDB ialah nilai semua hasil produksi sebuah negara, baik yang berupa barang maupun jasa. dalam satu periode.

Jika sebuah negara menghendaki pertumbuhan ekonomi, maka negara itu harus meningkatkan hasil produksi fisiknya, baik barang maupun jasa. Agar taraf hidup masyarakat tidak mengalami penurunan, maka produksi harus meningkat. Sebab, jumlah penduduk juga terus meningkat. Ada hubungan yang positif antara kenaikan produksi domestik bruto dengan faktor-faktor produksi yang digunakan. Jika faktor-faktor produksi yang dipakai semakin tinggi, lalu didukung oleh kondisi sosial yang baik, serta teknologi yang canggih, maka kian tinggi pula pendapatan nasional sebuah negara.

Pertumbuhan ekonomi juga harus diimbangi dengan terciptanya peluang kerja. Peluang kerja selalu menjadi sasaran pembangunan nasional. Sebab peluang kerja adalah sumber pendapatan bagi masyarakat negara tersebut. Selain itu, kesempatan kerja/ peluang kerja

merupakan sumber pendapatan nasional dari sektor PDB. Maka dari itu, dalam GBHN dinyatakan, bahwa tujuan pembangunan nasional adalah meningkatkan produksi nasional. Dengan demikian pertumbuhan ekonomi mestilah meningkatkan pula pertumbuhan lapangan pekerjaan. Peluang kerja tidak hanya mempunyai nilai ekonomis semata, tetapi juga nilai kemanusiaan, yaitu dengan menumbuhkan harga diri.

Peluang kerja bisa dimaknai sebagai *demand for labor*, yaitu sebuah kondisi yang menggambarkan ketersediaan lapangan kerja bagi para pencari kerja. Pengangguran akan terjadi apabila pertumbuhan angkatan kerja sangat tinggi sementara lapangan pekerjaan yang ada sangat terbatas. Sejauh ini, kenyataan yang ada masih konsisten, yakni pertumbuhan angkatan kerja yang selalu lebih besar.

Sehingga, angkatan kerja yang termasuk ke dalam kategori setengah pengangguran masih tetap tinggi. Itu berarti produktivitas mereka belumlah optimal. Budiman mengemukakan pendapat tentang peluang kerja/ kesempatan kerja (2004). Menurutnya peluang kerja ialah perbandingan antara angkatan kerja yang telah bekerja dengan keseluruhan jumlah angkatan kerja. Pengangguran akan muncul jika peluang kerja yang tersedia tidak bisa menyerap angkatan kerja. Permasalahan utamanya pengangguran yang terus dibiarkan tanpa adanya upaya penanganan akan mengakibatkan kemiskinan.

Adapun definisi kemiskinan menurut Friedman (1979) adalah kurangnya kesempatan untuk melakukan akumulasi pada asset-set produktif yang ada dan juga organisasi-organisasi, baik sosial maupun politik yang sekiranya bisa mewujudkan kepentingan umum, melaksanakan sosialisasi perihal peluang kerja, memberikan informasi, edukasi, serta

teknologi yang telah menjadi tuntutan hidup.

Hal serupa juga dikemukakan oleh Scott dengan mengartikan kemiskinan paling tidak mengandung tiga faktor, yaitu:

1. *Pertama*, kemiskinan didefinisikan sebagai kondisi seseorang yang buruk, sebab kesehatan, pendidikan, serta transportasi yang tidak memadai/ kurang. Kondisi-kondisi seperti yang disebutkan di atas itu membuat produktivitas kerja serta kemampuan seseorang tersebut menurun. Akibatnya, pendapatan yang didapatkannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup.
2. *Kedua*, kemiskinan didefinisikan sebagai sebuah kondisi dimana asset produksi seseorang (uang, rumah, tanah) mengalami kekurangan.
3. *Ketiga*, kemiskinan diartikan sebagai kondisi dimana kebutuhan non materi seperti hak merdeka, hak kebebasan tidak terpenuhi.

Hal tersebut sejalan dengan pendapat Rohidi (1993). Sedangkan menurut Quibria (1994), kemiskinan dibagi ke dalam dua jenis, yaitu kemiskinan relatif dan kemiskinan absolut. Kemiskinan absolut ialah sebuah kondisi/ keadaan di mana tidak mampu memenuhi standar kebutuhan minimum yang layak. Sedangkan kemiskinan relatif adalah sebuah kondisi di mana tidak mampu memenuhi standar hidup yang sesuai dengan apa yang diperlukan.

Dalam hal ini tergantung pada peninjaunya (bersifat subyektif). Menurut Tjiptoherjanto (1998) Faktor penyebab kemiskinan ada tiga perspektif, yaitu: kemiskinan natural, kultural, dan structural. Kemiskinan natural disebabkan faktor alamiah seperti perbedaan usia, kesehatan,

geografis, tempat tinggal (jenis lantai, penerangan, dinding). Kemiskinan kultural akibat dari perbedaan adat istiadat, etika kerja dan sebagainya. Sementara kemiskinan struktural diakibatkan oleh faktor-faktor buatan manusia. Misalnya: KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme), tidak tepatnya kebijakan ekonomi, tidak meratanya distribusi aset produktif, dan tatanan perekonomian dunia yang hanya berpihak pada sekelompok masyarakat tertentu.

Pada perspektif kemiskinan kultural, definisi tersebut adalah pandangan dari paradigma “kulturalis” yang menyatakan bahwa penyebab kemiskinan adalah kaum miskin itu sendiri. Untuk contohnya bisa disimak pada pendapat Banfield (1989). Ia memandang kemiskinan sebagai akibat dari gagalnya individu serta merupakan sikap yang menjadi penghambat niat memperbaiki nasib. Lewis (1988) juga mengemukakan, kemiskinan muncul sebagai dampak/ akibat adanya budaya kemiskinan.

Adapun budaya kemiskinan mencakup: berorientasi pada masa kini(sekarang), gagal melaksanakan rencana untuk masa mendatang, pengendalian diri yang kurang, sistim kepercayaan yang fatalistik, serta kurang mampu dalam pemanfaatan segala peluang yang ada.

Hasil-hasil penelitian kemiskinan di Indonesia dapat digolongkan pada dua sudut pandang/perspektif di atas yaitu dengan mengkaitkan kemiskinan dengan karakteristik si miskin dan faktor-faktor di luar dirinya.

Hubungan Antar Variabel

Variabel bebas (independent) dalam penelitian ini adalah: investasi pemerintah, investasi swasta, PDRB dari sektor primer, sekunder, tersier, dan UMKM. Sedangkan variabel terikatnya

(dependent) ialah variabel kesempatan kerja.

Hubungan antara Investasi Swasta terhadap Kesempatan Kerja

Suindyah (2009) menyimpulkan bahwa tingginya investasi pihak swasta yang masuk ke daerah, terkhusus investasi asing, akan berimbas pada peningkatan pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian secara otomatis akan memperluas peluang kerja/ kesempatan kerja. Jumlah angkatan kerja yang bekerja akan berpengaruh secara signifikan pada peningkatan pertumbuhan ekonomi. Besarnya pengeluaran pemerintah akan member dampak baik bagi pelaksanaan pembangunan di daerah, khususnya pembangunan ekonomi.

Aimon (2012) menyatakan bahwa, pertumbuhan ekonomi yang optimis, investasi kesehatan, investasi pendidikan, serta produktivitas masyarakat yang optimal akan mampu mengurangi (mereduksi) dengan signifikan tingkat kemiskinan di Indonesia. Produktivitas masyarakat akan meningkat jika nvestasi kesehatan dan investasi pendidikan meningkat.

Dengan demikian tingkat kemiskinan akan mengalami penurunan secara otomatis. Sebab telah menjadi sebuah keniscayaan, bahwa pertumbuhan ekonomi akan menjadi lebih baik apabila investasi fisik, produktivitas, dan kesempatan kerja sebuah Negara berada pada tingkat yang tinggi. Sebaliknya, jika yang meningkat adalah tingkat kemiskinannya, maka pertumbuhan ekonomi menjadi tereduksi.

Dengan demikian, investasi SDM dan produktivitas mesti menjadi variabel kebijakan, supaya bisa mengurangi tingkat kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi dan kemiskinan mempunyai hubungan yang *trade-off*. Hal ini sesuai dengan mekanisme peningkatan pertumbuhan

ekonomi di Indonesia dan sejalan pula dengan teori pertumbuhan ekonomi endogen. Oleh karena itu, kebijakan investasi SDM yang konsisten dan berdayaguna sangatlah layak untuk direkomendasikan. Sehingga akan diikuti oleh meningkatnya produktivitas. Dengan demikian tingkat kemiskinan bisa dikurangi.

Kebijakan tersebut harus diikuti oleh pemberian insentif serta kemudahan oleh pemerintah bagi investasi fisik. Sebab hal tersebut akan menciptakan lapangan pekerjaan yang akan mengakibatkan peningkatan pertumbuhan ekonomi. Sehingga, yang akan terjadi adalah peluang kerja menjadi bertambah dan tingkat kemiskinan menjadi diperkecil.

Hubungan antara Investasi Pemerintah terhadap Kesempatan Kerja

Meningkatnya investasi pemerintah akan mendorong meluasnya kesempatan kerja. Peran investasi pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja diantaranya diteliti oleh Arwati dan Hadiati (2013). Pada penelitian itu mereka meneliti tentang pengaruh dari pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah serta dana alokasi umum terhadap pengalokasian anggaran belanja modal baik secara simultan maupun parsial pada pemerintah daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Barat selama periode waktu tahun 2008-2010.

Hasilnya yaitu, secara parsial pendapatan asli daerah memberikan pengaruh yang signifikan terhadap belanja modal. Sementara, dana alokasi umum serta pertumbuhan ekonomi tidak mempengaruhi secara signifikan pengalokasian anggaran belanja modal.

Sedangkan secara simultan, dana alokasi umum, pertumbuhan ekonomi, serta pendapatan asli daerah memiliki pengaruh

pada pengalokasian anggaran belanja modal.

Penelitian Barika (2013) menyimpulkan, inflasi dan pertumbuhan ekonomi tidak memiliki pengaruh secara signifikan terhadap kemiskinan di Provinsi di Sumatera. Itu bisa menjadi sebuah indikasi bahwa pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera relatif kurang baik. Hal itu disebabkan karena pertumbuhan ekonomi di provinsi tersebut sebagian besar ditopang oleh sektor konsumsi.

Tidak hanya itu, aspek pemerataan pendapatan juga belum maksimal. Akibatnya, peningkatan pendapatan hanya dapat dinikmati oleh sebagian saja dari masyarakatnya. Tingkat pengangguran serta pengeluaran pemerintah terbukti berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kemiskinan Provinsi di Sumatera.

Hubungan antara Perkembangan Sektor-sektor Ekonomi terhadap Kesempatan Kerja

Pertumbuhan ekonomi merupakan bagian perkembangan kesejahteraan masyarakat yang diukur dengan besarnya pertumbuhan PDRB dari seluruh sektor. Baik sektor primer, sekunder, dan tersier. Menurut Darwanto dan Yulia (2007) Suatu daerah terindikasi mengalami kemajuan dalam perekonomian apabila nilai PDRB-nya tinggi. Struktur ekonomi yang menunjukkan struktur dari sektor-sektor ekonomi menunjukkan kemajuan relatif dari masing-masing sektor ekonomi.

Purwanti yang melakukan penelitian di daerah Bangli, Provinsi Bali (2009) menyimpulkan, pertumbuhan kesempatan kerja di Provinsi Bali beserta keunggulan kompetitifnya memiliki pengaruh positif terhadap peluang kerja nyata di daerah Kabupaten Bangli. Pada tahun awal penelitian, sektor industri pengolahan dan pertanian merupakan sektor basis kesempatan kerja di Kabupaten Bangli.

Lalu sektor basis menjadi bertambah pada sepuluh tahun kemudian, yakni menjadi tiga, yaitu sektor industri pengolahan, sektor pertanian, dan sektor pertambangan dan penggalian. Sektor baru tersebut bisa menyerap banyak tenaga kerja. Sektor di luar non basis tidak mampu menyerap tenaga kerja sehingga tidak mampu menghasilkan produk untuk pemenuhan kebutuhan lokal.

Hubungan antara UMKM terhadap Kesempatan Kerja

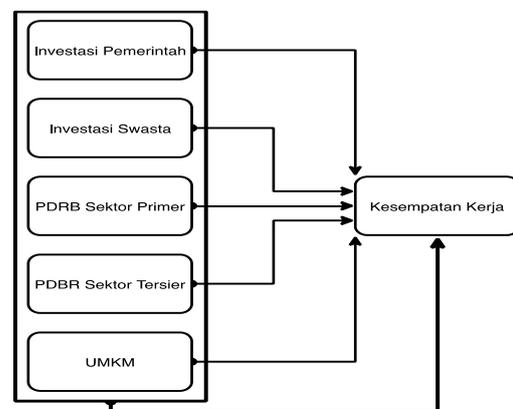
Berbagai penelitian di negara berkembang menunjukkan bahwa Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) memegang peranan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Di Indonesia, UMKM sangat berpengaruh terhadap perekonomian nasional, bahkan telah terbukti mampu menyelamatkan perekonomian bangsa ketika terjadi krisis ekonomi. Dewasa ini, kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah menunjukkan dukungan serta keberpihakan pada UMKM.

Hal itu merupakan langkah tepat untuk membangkitkan kembali perekonomian nasional. Sebab dengan kebijakan tersebut peluang kerja bagi masyarakat yang termarjinalkan menjadi terbuka. Tidak hanya di Indonesia, di Di semua negara maju pun, UMKM menjadi pilar utama perekonomian negara. UMKM juga makin diperhitungkan dalam upaya peningkatan stabilitas ekonomi dan persaingan pasar.

Di Indonesia sendiri, UMKM memiliki kedudukan penting dalam pembangunan ekonomi. Hal itu dikarenakan mayoritas penduduknya memiliki latar belakang pendidikan rendah dan hidup dengan menjalankan usaha kecil, baik pada sektor modern maupun tradisional.

Paradigma Penelitian`

Pada hakikatnya penelitian ini melihat kesempatan kerja di Provinsi Sumatera Barat selama periode 2000 hingga 2014. Analisis dilakukan untuk melihat faktor-faktor yang memiliki pengaruh terhadap peluang kerja di Provinsi Sumatera Barat, serta bagaimana peran masing-masing variabel. Adapun variabel-variabel yang diajukan pada tahap ini adalah investasi swasta, investasi pemerintah, PDRB sektor primer, sekunder, maupun tersier, dan UMKM. Paradigma penelitian ini tersaji pada gambar di bawah ini.



Gambar 2.3. Kerangka Penelitian

Posisi Penelitian

Kebaruan (*novelty*) penelitian ini adalah pemodelan kesempatan kerja melalui pengukuran dan pengujian efektivitas dan kemampuan merealisasikan sasaran dari kebijakan pemerintah dalam investasi pemerintah dan swasta serta pengembangan sektor-sektor ekonomi dan UMKM untuk meningkatkan kesempatan kerja.

Kebaruan penelitian juga terletak pada kajian atas masalah kesempatan kerja pada daerah dengan karakteristik yang unik, yaitu di Provinsi Sumatera Barat, dimana sektor tradisional di pedesaan merupakan penyerap tenaga kerja lebih banyak namun persentase kemiskinan di daerah pedesaan lebih tinggi daripada perkotaan.

Persentase kemiskinan di daerah pedesaan cenderung turun sedangkan di daerah perkotaan cenderung meningkat.

METODOLOGI PENELITIAN

Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah *explanatory study*. Pendekatan yang dipilih adalah *hypothesis testing study*. Adapun tujuan dari pendekatan ini yaitu menjelaskan serta melakukan pengujian terhadap hipotesis tentang hubungan kausal antar variabel. Adapun hubungan kausal dalam penelitian ini ialah pengaruh investasi pemerintah dan swasta serta perkembangan sektor-sektor ekonomi dan UMKM terhadap peluang kerja di Provinsi Sumatera Barat

Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian kali ini dimulai dari bulan Agustus 2015 hingga selesai, yaitu bulan Januari 2016. Lokasi di Padang, Provinsi Sumatera Barat. Proses penelitian dimulai dari proses ijin pengambilan data penelitian, pengumpulan data, serta observasi fakta di lapangan hingga pengolahan data, berikut interpretasi data dari lapangan.

Sumber dan Prosedur Pengambilan Data

Data sekunder adalah data yang digunakan dalam penelitian kali ini. Data berasal dari Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Barat. Berupa angka berbentuk data *time-series* mulai tahun 2000 hingga tahun 2014 dengan kurun waktu 15 tahun. Selain itu, sumber data sekunder lainnya diambil dari data Survei Sosial Ekonomi Nasional (BPS, 2015).

Semua data tersebut diperoleh melalui ijin resmi penelitian dengan pihak BPS di Kota Padang Provinsi Sumatera Barat.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Metode analisis yang digunakan yaitu Analisis Regresi Linear. Materi yang dianalisis adalah pengaruh investasi Pemerintah, investasi Swasta, PDRB sektor primer, PDRB sektor sekunder, PDRB sektor tersier, dan UMKM terhadap kesempatan kerja (uji hipotesis 1-7).

Uji F untuk uji simultan digunakan untuk menguji secara statistik hipotesa 1 dan hipotesa 7. Sedangkan hipotesis lainnya diuji statistik dengan uji t untuk uji parsial pada tipe uji 1-sisi dengan dugaan bahwa variabel penyebab berpengaruh positif atau searah terhadap variabel akibatnya, sesuai arah yang dihipotesakan.

Hasil uji hipotesis disajikan dengan diawali oleh persamaan model yang terlibat, hasil uji keberpengaruhan, serta hasil uji asumsi klasik. Dimana uji asumsi klasik menjadi syarat dari analisis regresi linear.

Pengaruh Investasi Pemerintah, Investasi Swasta, PDRB Sektor Primer, Sekunder, Tersier, dan UMKM terhadap Peluang Kerja

Persamaan regresi model pengaruh Investasi Pemerintah, Investasi Swasta, PDRB Sektor Primer, Sekunder, Tersier, dan UMKM terhadap Peluang Kerja yang dianalisis dalam kaitannya dengan uji hipotesis penelitian 1-7 dinyatakan sebagai berikut:

$$Y_t = k\beta_{01} + k\beta_{11}X_{1t} + k\beta_{21}X_{2t} + k\beta_{31}X_{3t} + k\beta_{41}X_{4t} + k\beta_{51}X_{5t} + k\beta_{61}X_{6t} + e_{1t}$$

dimana: $k\beta_{11}, k\beta_{21}, k\beta_{31}, k\beta_{41}, k\beta_{51}, k\beta_{61} > 0$

Keterangan:

- X₁ =Investasi Pemerintah
- X₂ =Investasi Swasta
- X₃ =PDRB Sektor Primer
- X₄ =PDRB Sektor Sekunder
- X₅ =PDRB Sektor Tersier
- X₆ =UMKM
- Y =Kesempatan Kerja
- k =Koefisien penyesuaian (*adjustment coefficient*) {0 < k ≤ 1}

Sebelum dianalisis, pengaruh Investasi Pemerintah, Investasi Swasta, PDRB Sektor Primer, Sekunder, Tersier, dan UMKM terhadap Peluang Kerja, lebih dulu diuji kesesuaiannya dengan asumsi klasik untuk regresi linear berganda. Adapun uji asumsi klasik terdiri dari uji normalitas, uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas serta uji autokorelasi.

Untuk uji normalitasnya menggunakan Kolmogorov-Smirnov. Pada tabel di bawah bisa dilihat bahwa residu model tampak berdistribusi normal. *P-value* dari nilai statistik Kolmogorov-Smirnov sebesar 0,050, dimana taraf signifikansi $\alpha=0,05$.

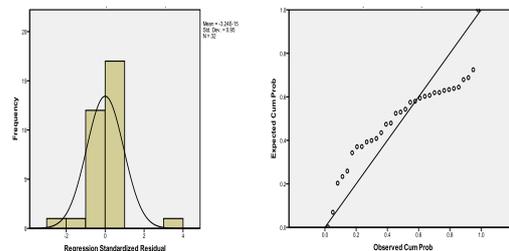
Tabel 4.1 Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test		
		Unstandardized Residual
Normal Parameters ^{a, b}	Mean	.000000
	Std. Deviation	2.18647910
Most Extreme Differences	Absolute	.240
	Positive	.240
	Negative	-.179
Kolmogorov-Smirnov Z		1.358
Asymp. Sig. (2-tailed)		.050

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Dari histogram distribusi dan juga diagram Normal P-P Plot, bisa dilihat bahwa distribusi residunya cenderung normal. Hal itu ditunjukkan oleh bentukan kurva yang normal. Pada gambar diagram pencar bisa dilihat, data juga cenderung mendekati garis diagonal kenormalan.



Gambar 4.1. Distribusi Normalitas Residu

Untuk uji multikolinieritas pada penelitian ini, yang digunakan adalah Variance Inflation Factor (VIF). Pada gambar di bawah bisa dilihat, tidak adanya indikasi situasi multikolinieritas. Sebab, semua variabel independent tidak mempunyai hubungan yang sangat tinggi. Nilai VIF-nya untuk Investasi Pemerintah, Investasi Swasta, PDRB Sektor Primer, PDRB Sektor Sekunder, PDRB Sektor Tersier, dan UMKM adalah sebagai berikut: 1,098; 1,027; 1,243; 1,052; 1,532; dan 1,125.

Dari angka-angka tersebut bisa disimpulkan bahwa tidak ada situasi multikolinieritas. Sebab nilai VIF-nya masih lebih rendah dari batas nilai yang dipersyaratkan, yaitu < 10.

Tabel 4.2. Hasil Uji Multikolinieritas

	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
X1	.911	1.098
X2	.974	1.027
X3	.924	1.243
X4	.951	1.052
X5	.653	1.532
X6	.889	1.125

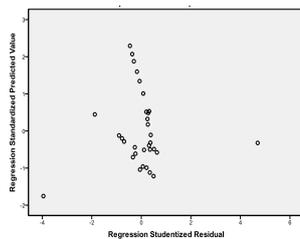
a. Dependent Variable: Y

Untuk uji heteroskedastisitas pada penelitian ini menggunakan uji Park, yakni dengan menguji kesignifikan koefisien korelasi *Rank-Spearman* antara variabel independen dengan absolut residu model. Bisa juga dilakukan dengan memakai analisis diagram pencar, yaitu antara residu terstudentkan dengan nilai prediksi terstandarkan. Hasilnya seperti yang terlihat pada gambar di bawah. Semua variabel independen tidak berkorelasi secara signifikan dengan absolut residu. (*p-value* [0,389; 0,217; 0,943; 0,825; 0,832; dan 0,994]). Itu berarti bisa disimpulkan bahwa dalam penelitian ini tidak adanya kondisi heteroskedastisitas.

Tabel 4.3 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Correlations		Absolut of Lagrange and Wald
X1	Parameter Coefficient Sig. (2-tailed) N	.177 .989 70
X2	Parameter Coefficient Sig. (2-tailed) N	.183 .217 70
X3	Parameter Coefficient Sig. (2-tailed) N	.075 .645 70
X4	Parameter Coefficient Sig. (2-tailed) N	.127 .622 70
X5	Correlation Coefficient Sig. (2-tailed) N	-.115 .632 70
X6	Correlation Coefficient Sig. (2-tailed) N	.081 .681 70

Sedangkan pada diagram pancar, hasilnya menunjukkan, data cenderung acak atau membentuk formasi pola tertentu. Dengan demikian, kesimpulannya sama, yaitu tidak adanya situasi heteroskedastisitas.



Gambar 4.2 Diagram Pancar

Untuk autokorelasi menggunakan uji Durbin-Watson menunjukkan tidak terjadi situasi autokorelasi dalam model ($DW = 2,079 > dU$).

Tabel 4.4 Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary ^b	
Model	Durbin-Watson
1	2.079

Sesuai dengan hasil uji asumsi yang telah dijelaskan di atas, maka bisa disimpulkan bahwa telah memenuhi asumsi normalitas, multikolinieritas, heteroskedastisitas serta autokorelasi yang dipersyaratkan. Sehingga, itu berarti regresi dari hasil pengolahan data bisa dianalisis demi kepentingan uji hipotesis.

Rangkuman hasil analisis regresi linear berganda untuk pengaruh Investasi Pemerintah, Investasi Swasta, PDRB Sektor Primer, Sekunder, Tersier, dan UMKM terhadap Peluang Kerja adalah sebagai berikut:

Tabel 4.5 Hasil Analisis

Dependent Variable: Y				
Method: Least Squares				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
(C)	0,006031	0,01238	3,99929	0,0000
X1	0,097591	0,044779	2,18200	0,0343
X2	0,097591	0,201770	1,91143	0,1423
X3	0,056260	0,047901	1,79168	0,0899
X4	0,035552	0,187481	1,15246	0,2528
X5	0,087541	0,025411	3,44420	0,0001
X6	0,023473	1,788407	1,03240	0,3120
1.a	0,479108	0,091480	5,23121	0,0000
R-squared	0,708101	Mean Dependent var		11,78010
Adjusted R-squared	0,698128	S.D. dependent var		1,081662
R.F. of regression	0,516894	Adjusted R-squared		3,491510
Sum of squares (total)	11,801391	Schwarz criterion		3,219779
Log likelihood	48,76681	F-critical		11,89930
Durbin-Watson stat	2,079113	Prob(F <= F(1,68))		0,000001

Hasil analisis tampak bahwa nilai konstanta atau intersep dari model adalah sebesar $b_{01} = 0,006031$ yang menunjukkan besarnya nilai Kesempatan Kerja secara matematis (dalam satuan) jika Investasi Pemerintah, Investasi Swasta, PDRB Sektor Primer, dan UMKM berharga nol (0).

Koefisien regresi dari Investasi Pemerintah adalah sebesar $b_{11} = 0,097591$ yang berarti jika Investasi Pemerintah naik sebesar 1 satuan, maka Kesempatan Kerja akan meningkat sebesar 0,097591 satuan. Koefisien regresi dari Investasi Swasta adalah sebesar $b_{21} = 0,056260$ yang berarti jika Investasi Swasta naik sebesar 1 satuan, maka Kesempatan Kerja akan meningkat sebesar 0,056260 satuan. Adapun koefisien regresi dari PDRB Sektor Primer adalah sebesar $b_{31} = 0,035552$ yang berarti jika PDRB Sektor Primer naik sebesar 1 satuan, Peluang Kerja akan mengalami peningkatan sebesar 0,035552 satuan.

Koefisien regresi dari PDRB Sektor Sekunder adalah sebesar $b_{41} = 0,051252$ yang berarti jika PDRB Sektor Sekunder naik sebesar 1 satuan, Peluang Kerja akan naik sebesar 0,051252 satuan. Koefisien regresi dari PDRB Sektor Tersier adalah sebesar $b_{51} = 0,087541$ yang berarti jika PDRB Sektor Tersier naik sebesar 1 satuan, Peluang Kerja akan mengalami peningkatan sebesar 0,087541 satuan.

Sedangkan koefisien regresi dari UMKM adalah sebesar $b_{61} = 0,023473$ yang berarti jika UMKM naik sebesar 1 satuan, maka Peluang Kerja akan meningkat sebesar 0,023473 satuan. Model di atas mempunyai nilai Koefisien Determinasi *Adjusted* sebesar $R^2_{Adjusted} = 69,0\%$. Nilai ini menunjukkan besarnya pengaruh Investasi Pemerintah, Investasi Swasta, PDRB Sektor

Primer, dan UMKM terhadap Peluang Kerja adalah sebesar 69,0%. Itu berarti, besarnya variasi Peluang Kerja yang bisa dijelaskan oleh model Investasi Pemerintah, Investasi Swasta, PDRB Sektor Primer, dan UMKM ialah sebesar 69,0%. Sedangkan sisanya, sebesar $1 - R^2_{\text{Adjusted}} = 31,0\%$, dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak dimasukkan sebagai variabel dalam penelitian ini. diteliti.

Hasil uji pengaruh Investasi Pemerintah, Investasi Swasta, PDRB Sektor Primer, Sekunder, Tersier, dan UMKM terhadap Peluang Kerja melalui uji keberartian seluruh koefisien regresi dengan uji F memberikan hasil nilai F sebesar 12,889 dengan $p\text{-value} = 0,000$. Dari situ terlihat, nilai p lebih rendah daripada $\alpha 0,05$. Dengan demikian H_{01} ditolak. Hipotesis 1 perihal adanya pengaruh dari Investasi Pemerintah, Investasi Swasta, PDRB Sektor Primer, Sekunder, Tersier, dan UMKM secara simultan terhadap Peluang Kerja, diterima. Hal ini menggambarkan pengaruh Investasi Pemerintah, Investasi Swasta, PDRB Sektor Primer, Sekunder, Tersier, dan UMKM terhadap Peluang Kerja ialah nyata ($p < 0,05$). Hasil uji dikuatkan oleh terpenuhinya asumsi normalitas, multikolinieritas, heteroskedastisitas serta autokorelasi yang dipersyaratkan.

Dari hasil analisis diperoleh koefisien penyesuaian (*adjustment coefficient*) sebesar $k = 0,125$ dimana: $1 - k = 0,875$ menunjukkan kemampuan pemerintah daerah untuk merealisasikan peluang kerja di wilayah Provinsi Sumatera Barat dari kebijakan investasi pemerintah, investasi swasta, PDRB sektor primer, Sekunder, Tersier, dan UMKM adalah sebesar 12,5% dan tingkat kesulitan realisasi kesempatan kerja tersebut di Provinsi Sumatera Barat adalah sebesar 87,5%.

Hasil uji pengaruh Investasi Pemerintah secara parsial terhadap Peluang Kerja lewat uji keberartian koefisien regresi dengan uji t memberikan hasil nilai t sebesar 2,626303 dengan $p\text{-value} = 0,014$. Tampak bahwa nilai $p\text{-value} = 0,014$ lebih kecil daripada $\alpha 0,05$. Karena itu diputuskan bahwa $H_{02(1)}$ ditolak. Hipotesis 2(1) tentang terdapatnya pengaruh positif dari Investasi Pemerintah terhadap Peluang Kerja, diterima. Hal ini menggambarkan bahwa secara parsial, Investasi Pemerintah berpengaruh positif dan

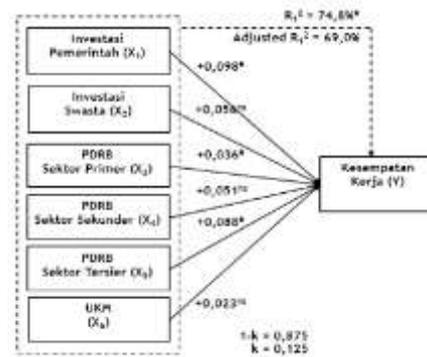
signifikan terhadap Peluang Kerja ($p < 0,05$). Demikian pula PDRB dari sektor Primer, Sekunder, Tersier juga memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Peluang Kerja ($p < 0,05$). Adapun untuk Investasi Swasta, PDRB Sektor Sekunder, dan UMKM, pengaruhnya positif tetapi tidak signifikan ($p > 0,05$).

Berdasarkan hasil analisis pengaruh Investasi Pemerintah secara individual terhadap Peluang Kerja, demikian juga dari Investasi Swasta, PDRB Sektor Primer, Sekunder, Tersier, dan UMKM secara individual terhadap Peluang Kerja diperoleh koefisien penyesuaian (*adjustment coefficient*) untuk masing-masing variabel adalah sebagai berikut:

1. Untuk Investasi Pemerintah sebesar $k = 0,102$ dimana: $1 - k = 0,898$ yang menunjukkan kemampuan pemerintah daerah untuk merealisasikan peluang kerja di Provinsi Sumatera Barat dari kebijakan investasi pemerintah saja adalah sebesar 10,2% dan tingkat kesulitan realisasi peluang kerja tersebut di Provinsi Sumatera Barat adalah sebesar 89,8%.
2. Untuk Investasi Swasta sebesar $k = 0,014$ dimana: $1 - k = 0,986$ yang menunjukkan kemampuan pemerintah daerah untuk merealisasikan peluang kerja di wilayah Provinsi Sumatera Barat dari kebijakan investasi swasta saja adalah sebesar 1,4% dan tingkat kesulitan realisasi peluang kerja tersebut di Provinsi Sumatera Barat adalah sebesar 98,6%.
3. Untuk PDRB Sektor Primer sebesar $k = 0,118$ dimana: $1 - k = 0,882$ yang menunjukkan kemampuan pemerintah daerah untuk merealisasikan kesempatan kerja di Provinsi Sumatera Barat dari kebijakan pengembangan sektor primer saja adalah sebesar 11,8% dan tingkat kesulitan realisasi kesempatan kerja tersebut di Provinsi Sumatera Barat adalah sebesar 88,2%.
4. Untuk PDRB Sektor Sekunder sebesar $k = 0,161$ dimana: $1 - k = 0,839$ yang menunjukkan kemampuan pemerintah daerah untuk merealisasikan kesempatan kerja di Provinsi Sumatera Barat dari kebijakan pengembangan sektor sekunder saja adalah sebesar 16,1% dan tingkat kesulitan realisasi kesempatan kerja

tersebut di Provinsi Sumatera Barat adalah sebesar 83,9%.

- Untuk PDRB Sektor Tersier sebesar $k = 0,238$ dimana: $1 - k = 0,762$ yang menunjukkan kemampuan pemerintah daerah untuk merealisasikan peluang kerja di Provinsi Sumatera Barat dari kebijakan pengembangan sektor tersier saja adalah sebesar 23,8% dan tingkat kesulitan realisasi kesempatan kerja tersebut di Provinsi Sumatera Barat adalah sebesar 76,2%.
- Untuk UMKM sebesar $k = 0,024$ dimana: $1 - k = 0,976$ yang menunjukkan kemampuan pemerintah daerah untuk merealisasikan kesempatan kerja di Provinsi Sumatera Barat dari kebijakan pengembangan UMKM saja adalah sebesar 2,4% dan tingkat kesulitan realisasi kesempatan kerja tersebut di Provinsi Sumatera Barat adalah sebesar 97,6%.



Gambar 4.3. Hasil Penelitian

Secara simultan, Investasi Pemerintah, Investasi Swasta, PDRB Sektor Primer, Sekunder, Tersier, dan UMKM memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Peluang Kerja. Besarnya pengaruh keenam faktor tersebut adalah sebesar 74,8%. Temuan ini menunjukkan bahwa kesempatan kerja dapat ditingkatkan jika terdapat sinergitas antara kebijakan pemerintah dalam investasi (pemerintah dan swasta), pengembangan sektor-sektor ekonomi (primer, sekunder, dan tersier), dan UMKM. Secara parsial, Kesempatan Kerja lebih dipengaruhi secara positif oleh Investasi Pemerintah, PDRB Sektor Primer, dan PDRB Sektor Tersier. Investasi Pemerintah merupakan variabel dominan bagi Kesempatan Kerja.

Berdasarkan hasil analisis diperoleh koefisien penyesuaian (adjustment coefficient) atau $k = 0,125$ yang menunjukkan bahwa kemampuan pemerintah untuk merealisasikan target kesempatan kerja dari kebijakan investasi pemerintah dan swasta; PDRB sektor primer, sekunder, dan tersier; serta UMKM masih rendah, yaitu sebesar 12,5%.

Hasil analisis secara individual menunjukkan bahwa kemampuan pemerintah untuk merealisasikan target kesempatan kerja dari masing-masing kebijakan juga masih rendah, yaitu di bawah 50%. Kemampuan merealisasikan target kesempatan kerja dari yang terendah s/d tertinggi adalah dari: investasi swasta (1,4%), UMKM (2,4%), investasi pemerintah (10,2%), PDRB sektor primer (11,8%), PDRB sektor sekunder (16,1%), dan PDRB sektor tersier (23,8%).

Tabel 4.6 Hasil Analisis *Adjustment Coefficient*

Model Penelitian	Kesulitan Merealisasikan (1-k)	Kemampuan Merealisasikan (k)
Investasi Pemerintah, Investasi Swasta, PDRB Sektor Primer, PDRB Sektor Sekunder, PDRB Sektor Tersier, UMKM → Kesempatan Kerja	0,875 (87,5%)	0,125 (12,5%)

Eksplorasi Model	Kesulitan Merealisasikan (1-k)	Kemampuan Merealisasikan (k)
Investasi Pemerintah → Kesempatan Kerja	0,898 (89,8%)	0,102 (10,2%)
Investasi Swasta → Kesempatan Kerja	0,986 (98,6%)	0,014 (1,4%)
PDRB Sektor Primer → Kesempatan Kerja	0,882 (88,2%)	0,118 (11,8%)
PDRB Sektor Sekunder → Kesempatan Kerja	0,839 (83,9%)	0,161 (16,1%)
PDRB Sektor Tersier → Kesempatan Kerja	0,762 (76,2%)	0,238 (23,8%)
UMKM → Kesempatan Kerja	0,976 (97,6%)	0,024 (2,4%)

PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian hipotesis, secara umum variabel-variabel penyebab yang diteliti mempunyai pengaruh terhadap variabel akibat. Arah pengaruhnya sesuai dengan yang telah diprediksikan oleh teori. Sesuai dengan hasil analisis secara keseluruhan, faktor-faktor penyebab secara umum adalah faktor-faktor yang pengaruhnya dominan terhadap variabel akibat, relatif apabila dibandingkan dengan pengaruh faktor-faktor lainnya yang tidak diteliti. Singkatnya, hasil penelitian perihal pengaruh antar variabel bisa dilihat pada gambar di bawah ini.

Pengangguran dapat diselesaikan jika tersedia kesinambungan investasi yang bersifat padat karya (*labour intensive*), baik dari pemerintah maupun swasta, dan pertumbuhan ekonomi, baik sektor primer, sekunder, maupun tersier, serta pertumbuhan UMKM, secara merata dan menjangkau angkatan kerja yang masih menganggur. Usaha peningkatan investasi, produk domestik bruto, dan UMKM akan efektif dalam meningkatkan kesempatan kerja jika ada integrasi dan koordinasi yang baik antar pihak-pihak yang berkepentingan untuk mendorong pemerataan investasi, pertumbuhan ekonomi, dan pertumbuhan UMKM antar sektor ekonomi dan meningkatkan akses penganggur pada lapangan kerja yang tersedia.

Untuk meningkatkan kemampuan pemerintah dalam merealisasikan target kesempatan kerja, perlu adanya kebijakan untuk mengatasi berbagai kendala yang dihadapi, khususnya peningkatan kepastian hukum atas kepemilikan tanah yang menghambat investasi (karena status tanah adat), pengembangan infrastruktur yang adaptif dengan kondisi alam (risiko gempa), dan pengembangan sektor-sektor ekonomi unggulan dan kewirausahaan sesuai potensi ekonomi daerah di Provinsi Sumatera Barat.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Investasi Pemerintah, Investasi Swasta, PDRB Sektor Primer, PDRB Sektor Sekunder, PDRB Sektor Tersier, dan UMKM berpengaruh simultan secara signifikan terhadap Kesempatan Kerja. Meningkatnya Investasi Pemerintah, Investasi Swasta, PDRB Sektor Primer, PDRB Sektor Sekunder, PDRB Sektor Tersier, dan UMKMemiliki kemampuan yang cukup tinggi untuk mendorong peningkatan Kesempatan Kerja. Kesempatan Kerja dapat dioptimalisasikan jika terdapat sinergitas upaya pemerintah dalam mendorong Investasi Pemerintah, Investasi Swasta, PDRB Sektor Primer, PDRB Sektor Sekunder, PDRB Sektor Tersier, dan UMKM. Berdasarkan perbandingan pengaruhnya, peningkatan Kesempatan Kerja lebih ditentukan oleh

Investasi Pemerintah, PDRB Sektor Primer, dan PDRB Sektor Tersier.

2. Investasi Pemerintah memiliki pengaruh yang positif serta signifikan secara parsial terhadap Peluang Kerja. Meningkatnya Investasi Pemerintah efektif dalam mendorong peningkatan Peluang Kerja.
3. Investasi Swasta tidak memiliki pengaruh yang positif serta signifikan secara parsial terhadap Peluang Kerja. Meningkatnya Investasi Swasta belum efektif dalam mendorong peningkatan Peluang Kerja.
4. PDRB Sektor Primer memiliki pengaruh yang positif serta signifikan secara parsial terhadap Peluang Kerja. Meningkatnya PDRB Sektor Primer efektif dalam mendorong peningkatan Peluang Kerja.
5. PDRB Sektor Sekunder tidak memiliki pengaruh yang positif serta signifikan secara parsial terhadap Peluang Kerja. Meningkatnya PDRB Sektor Sekunder belum efektif dalam mendorong peningkatan Peluang Kerja.
6. PDRB Sektor Tersier memiliki pengaruh positif serta signifikan secara parsial terhadap Peluang Kerja. Meningkatnya PDRB Sektor Tersier efektif dalam mendorong peningkatan Peluang Kerja.
7. UMKM tidak memiliki pengaruh yang positif serta signifikan secara parsial terhadap Peluang Kerja. Meningkatnya UMKM belum efektif dalam mendorong peningkatan Peluang Kerja.

Diperoleh kesimpulan tambahan bahwa kemampuan pemerintah untuk merealisasikan target kesempatan kerja dari kebijakan investasi pemerintah dan swasta; PDRB sektor primer, sekunder, dan tersier; serta UMKM masih rendah, baik secara keseluruhan maupun individual.

Saran

Berpijak pada kesimpulan yang sudah dipaparkan di atas, maka saran yang bisa diberikan penulis/ peneliti yaitu:

1. Untuk pemerintah daerah, lanjutkan kebijakan yang mendukung upaya untuk meningkatkan Peluang Kerja melalui peningkatan Investasi Pemerintah, Investasi Swasta, PDRB Sektor Primer, Sekunder, Tersier, dan UMKM secara sinergis.

Sinergitas dapat lebih dioptimalkan dengan menyusun kebijakan dan program peningkatan Kesempatan Kerja secara bersama-sama antara pemerintah daerah, pemerintah pusat, dan sektor swasta.

Disarankan pula agar pemerintah daerah terus mendorong peningkatan investasi pemerintah serta PDRB sektor primer dan tersier sebagai kontributor utama kesempatan kerja. Selain itu disarankan kepada pemerintah daerah agar meningkatkan efektivitas investasi swasta, PDRB sektor sekunder, dan UMKM dalam mendorong peningkatan Kesempatan Kerja.

Untuk meningkatkan kemampuan merealisasikan target kesempatan kerja, disarankan agar meningkatkan kepastian hukum atas kepemilikan tanah yang menghambat investasi (karena status tanah adat), mengembangkan infrastruktur yang adaptif dengan kondisi alam (risiko gempa), dan mengembangkan sektor-sektor ekonomi unggulan dan kewirausahaan sesuai potensi ekonomi daerah.

2. Untuk pemerintah daerah, teruskan melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi program padat karya (*labour intensive*) guna menurunkan tingkat kemiskinan, khususnya pada wilayah-wilayah marginal.

Untuk meningkatkan kemampuan merealisasikan target penurunan kemiskinan, disarankan agar meningkatkan aksesibilitas masyarakat miskin pada kesempatan kerja yang tersedia dan mengatasi masalah budaya yang menghambat produktivitas kerja.

DAFTAR PUSTAKA

- Banfield, J.F. dan Eggleton, R.A. 1989. *Apatite Replacement and Rare Earth Mobilization, Fractionation, and Fixation During Weathering : Clays and Clay Minerals*, vol. 37 no 2, p 113-127.
- Barika. 2013. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pengeluaran Pemerintah, Pengangguran dan Inflasi terhadap Tingkat Kemiskinan di Provinsi se-Sumatera. *Jurnal Ekonomi dan Perencanaan Pembangunan*. Vol. 05 No. 01, Januari-Juni 2013. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bengkulu.
- Darwanto dan Yulia Yustikasari, 2007. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal. Simposium Nasional Akuntansi X, Makasar.
- Deliarnov. 1995. *Perkembangan Pemikiran Ekonomi*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Friedman, J. 1979. Urban Poverty In America Latin, Some Theoretical Consideration, dalam Dorodjatun Kuntjoro Jakti (ed). 1986. *Kemiskinan di Indonesia*. Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Jinghan. 2000. *Ekonomi dan Perencanaan Pembangunan*. Terjemahan. Rajawali, Jakarta.
- Makmun dan Yasin, Akhmad. 2003. Pengaruh Investasi dan Tenaga Kerja terhadap PDB Sektor Pertanian. *Kajian Ekonomi dan Keuangan* 7(3): 57-83.
- Purwanti. 2009. Analisis Kesempatan Kerja Sektoral di Kabupaten Bangli dengan Pendekatan Pertumbuhan Berbasis Ekspor. *Jurnal Kependudukan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia PIRAMIDA*. Vol. V No. 1. Jurusan Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi Universitas Udayana, Bali.
- Rohidi, Tjetjep Rohendi. 1993. Analisis Kualitatif (Deskriptif Singkatan Dalam Konteks Penelitian Kualitatif). *Media Komunikasi Penelitian IKIP Semarang* No. 1 Thn VIII Februari 1992.
- Suindyah. 2009. Pengaruh Investasi, Tenaga Kerja, dan Pengeluaran Pemerintah terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Propinsi Jawa Timur. *Jurnal EKUITAS*, Akreditasi no. 110/DIKTI/Kep/2009, Fakultas Ekonomi Universitas Darul Ulum, Jombang.
- Todaro, Michael P. 2000. *Ekonomi Pembangunan*. Diterjemahkan oleh Haris Munandar. Edisi Kelima. Bumi Aksara, Jakarta.